

14/LP/FIS/12/2016

Laporan Penelitian

**PENETAPAN HUKUMAN
PELANGGAR WAJIB ZAKAT
DENGAN DALIL *ISTISHLAH***



Oleh:

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 198201012015031002

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2016

Laporan Penelitian



**PENETAPAN HUKUMAN
PELANGGAR WAJIB ZAKAT
DENGAN DALIL *ISTISHLAH***



Oleh:

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 198201012015031002

P
2014.14
/MA
p
E.1

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2016

TGL. TERIMA:	20-12-2016
NO. INDUK	14/LP/FIS/12/16
ASAL	Sumbangan dosen UIN-SU

SURAT REKOMENDASI

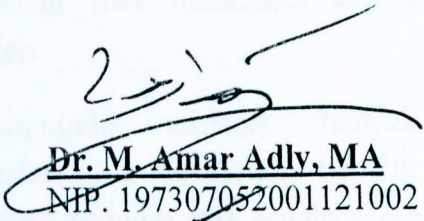
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saudara:

Nama : Dr. Imam Yazid, MA
NIP : 198201012015031002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III/b
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial
 UIN Sumatera Utara

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah setelah membaca dan memberikan masukan dan saran-saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 5 Desember 2016



Dr. M. Amar Adly, MA

NIP. 197307052001121002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan hidayah, rahmat, karunia, kesempatan dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya, yang telah membawa risalah Islam demi keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Penelitian ini diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi demi penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan yang telah dilakukan.

Penelitian ini mungkin terdapat banyak kekurangan, baik secara materi atau metodenya. Peneliti akan menerima dengan tangan terbuka atas segala saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian yang telah dilakukan.

Semoga penelitian ini bermanfaat.

Medan, 30 November 2016



Dr. Imam Yazid, MA

DAFTAR ISI

Surat Rekomendasi.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Kegunaan Penelitian.....	4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka	5
B. Kerangka Pemikiran	7
1. <i>Istishlah</i> sebagai Metodologi Hukum Islam	7
2. Teori Sanksi Hukum.....	10

BAB III. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	14
B. Jenis Data	15
C. Sumber Data	15
D. Teknik Pengumpulan Data	16
E. Analisis Data	16

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Peningkar Zakat	
1. Peningkar Zakat dalam Alquran.....	18
2. Peningkar Zakat dalam Hadis.....	23

B. Hukuman Pelanggar Wajib Zakat Menurut <i>Fuqaha</i>	30
C. Hukuman Pelanggar Wajib Zakat dengan Dalil <i>Istishlah</i>	36
1. Tujuan Hukuman.....	36
2. Filosofi Hukuman Pelanggar Wajib Zakat.....	43

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PERPUSTAKAAN	49
---------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abu Bakar adalah pengganti pertama Rasulullah Saw sebagai kepala negara yang menyatakan perang terhadap orang-orang muslim yang tidak mau menunaikan kewajiban zakat. Abu Bakar menganggap mereka sebagai pembangkang. Argumentasi yang dikemukakan oleh Abu Bakar adalah bahwa orang-orang muslim yang tidak membayar zakat telah membedakan kompetensi antara Nabi Muhammad Saw (sebagai pemimpin umat) dan pengganti setelah Nabi wafat, yakni khalifah Abu Bakar. Abu Bakar merujuk landasan normatifnya yaitu zakat merupakan hak harta yang harus diserahkan, dan perbuatan sekelompok umat Islam yang membedakan kedudukan antar rukun Islam (seperti kewajiban shalat dan zakat) maka kalangan pengingkar zakat saat itu dihukum sebagai pemberontak yang mesti diperangi.¹

Hukuman yang ditetapkan Abu Bakar adalah hasil ijtihad, yaitu hasil dari upaya Abu Bakar menggali dalil-dalil *syar'i* dengan mengerahkan segala kesungguhannya agar bisa menemukan hukum. Hal tersebut terjadi karena tidak ada bentuk hukuman (*hudud*) terhadap pengingkar zakat dalam *nash*. Ijtihad Abu Bakar pada awalnya sempat dikritik oleh Umar bin Khattab namun setelah diberi penjelasan ia membenarkan pendapat Abu Bakar.

Demi menemukan/menggali dan menetapkan hukum Islam, para *fuqaha* telah berlatih mengerahkan segenap kemampuan nalarnya (diistilahkan dengan ijtihad). Ada banyak macam metode ijtihad yang kesemuanya merupakan hasil rumusan para mujtahid. Diantara metode-metode ijtihad itu ada metode yang menjadi kekhasan seorang mujtahid dan berbeda dengan mujtahid lain. Perbedaan metode ijtihad itu

¹ Ibn Katsir, *Tartib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wa al-Nihayah*, editor: Muhammad ibn Shamil, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 76.

berimplikasi pada munculnya perbedaan hasil ijtihad antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya. Perbedaan metode tersebut ditentukan oleh jenis petunjuk dan bentuk pertimbangan yang dipakai oleh masing-masing mujtahid dalam ijtihadnya.

Diantara metode ijtihad yang dirumuskan ulama ada dikenal *istishlah*, yaitu suatu dalil hukum *syara'* yang termasuk dalam kategori dalil yang penggunaannya tidak disepakati oleh ulama-ulama sebagai pelengkap dari empat dalil *syara'* (yaitu Alquran, Sunah, *Ijma'*, dan *Qiyas*). Penggunaan *istishlah* sebagai dalil hukum akan menciptakan perbedaan hukuman atas pelanggaran wajib zakat yang pernah diijtihadkan oleh Abu Bakar pada masa dahulu dengan situasi politik yang berbeda pula.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, telaah dalil hukum atas hukuman pelanggaran wajib zakat merupakan sesuatu yang tepat untuk dikaji lebih komprehensif. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian yang berjudul "Penetapan Hukuman Pelanggaran Wajib Zakat dengan Dalil *Istishlah*."

B. Batasan Masalah

Zakat merupakan salah satu diantara lima rukun Islam. Penelitian ini berfokus pada zakat sebagai bagian dari syariat yang memiliki dimensi '*ubudiyah* (hak Allah) dan *insaniyah* (hak hamba). Beberapa aturan hukum Islam memang tidak hanya bermuatan pengabdian pada Allah semata atau sekedar mengatur hubungan vertikal saja. Hukum Islam juga sarat dengan muatan-muatan kemanusiaan yang sifatnya horizontal. Hukum Islam yang berdimensi *insaniyah* misalnya adalah wakaf, zakat, infaq, sedekah, prinsip-prinsip muamalah, dan lain-lain.

Zakat di Indonesia menjadi perhatian yang sangat penting bagi masyarakat muslim. Praktik zakat telah dilakukan umat Islam sejak masa pra-kemerdekaan Republik Indonesia dan terus berkembang sehingga menjadi pranata kehidupan beragama dalam bingkai negara Indonesia. Puncaknya adalah ketika zakat dijadikan hukum positif dalam bentuk Undang-

Undang, yaitu hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Tujuan zakat dijadikan hukum positif tertulis adalah agar zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik akan berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana termaktub dalam konsiderans Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Eksistensi regulasi zakat di Indonesia tidak terlepas dari sistem tata negara Republik Indonesia yang menganut teori kedaulatan rakyat sehingga berimplikasi pada terbukanya peluang umat Islam (sebagai unsur/bagian rakyat Indonesia) untuk mengamalkan ajarannya melalui institusi negara, terlebih ajaran zakat merupakan norma yang berstatus hukum wajib bagi muslim, dan yang terpenting dalam konteks ini adalah kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga hikmah zakat tidak hanya berhubungan secara vertikal bahkan beriringan dengan hubungan horizontal atau sosial.

Keluasan kajian zakat memang bersentuhan terhadap hubungannya dengan sistem tata negara di Indonesia. Tetapi penelitian tidak mengkaji problematika tersebut. Penelitian ini membatasi pada kajian metodologi hukum Islam (*Ushul Fiqh*) terkait penetapan hukuman pelanggar wajib zakat dengan dalil *istishlah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pengingkar zakat dalam Alquran dan Hadis?
2. Bagaimana hukuman pelanggar wajib zakat menurut *fuqaha*?
3. Bagaimana hukuman pelanggar wajib zakat dengan dalil *istishlah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun, yaitu untuk mengetahui:

1. Kedudukan pengingkar zakat dalam Alquran dan Hadis.
2. Hukuman pelanggar wajib zakat menurut *fuqaha*.
3. Hukuman pelanggar wajib zakat dengan dalil *istishlah*.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian tentang penetapan hukuman pelanggar wajib zakat dengan dalil *istishlah* akan menjadi kontribusi yang berguna:

1. Secara akademik. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan konseptual atau nalar akademis untuk mengetahui penetapan hukuman pelanggar wajib zakat dengan dalil *istishlah*.
2. Secara praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan oleh negara mengenai sanksi pelanggar wajib zakat untuk menciptakan kemaslahatan perekonomian nasional. Kontribusi penelitian ini tidak menutup kemungkinan akan merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

Telah muncul sejumlah karya disertasi di Indonesia yang secara khusus membahas tentang persoalan zakat. Diantaranya adalah:

1. Sjechul Hadi Permono (1998), "*Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional*."² Fokus masalah yang dibahas dalam disertasi ini adalah kajian mengenai persamaan zakat dan pajak, bagaimana menggunakan perolehan zakat untuk pembangunan nasional, dan bagaimana kedudukan pemerintah Indonesia sebagai amil zakat. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan fiqih dan yuridis.
2. Abdurrachman Qadir (1998), "*Zakat dalam dimensi Ibadah Mahdhah dan Sosial*."³ Fokus masalah dalam disertasi ini adalah penelaahan zakat dilihat dari konsep keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat dan kontekstual.
3. Dasril (2000), "*Upaya Bazis DKI Jakarta Mengatasi Kemiskinan di Jakarta Pusat*." Fokus masalah yang dibahas Dasril dalam disertasi ini adalah pengelolaan zakat yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta, upaya-upaya yang telah dilakukan serta faktor pendukung dan penghambatnya.
4. Didin Hafidhuddin (2001), "*Zakat dalam Perekonomian Modern*."⁴ Disertasi ini memfokuskan pada masalah

² Sjechul Hadi Permono, "*Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional*", *Disertasi Doktor* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 1988).

³ Abdurrachman Qadir, "*Zakat dalam Dimensi Ibadah Mahdhah dan Sosial*", *Disertasi Doktor* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 1998).

⁴ Didin Hafidhuddin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", *Disertasi Doktor* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2001).

sumber zakat dalam perekonomian modern. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi.

5. Dail hikam (2004), "*Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*. Dikemukakan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif merupakan persoalan yang terkait dengan tujuan syariat dan kemaslahatan hidup umat Islam sehingga peran amil dalam persoalan ini sangat strategis. Oleh karenanya kerja keras. Keterampilan dan profesionalisme menjadi kunci kesuksesan.
6. A. A. Miftah (2005), "*Zakat sebagai Hukum Diyani dan Qada'i dalam Negara Indonesia*."⁵ Penelitian itu berusaha untuk menjawab mengapa dan bagaimana negara harus terlibat dalam masalah zakat.
7. Hamzah (2009), "*Pendayagunaan Zakat pada badan Amil Zakat Nasional dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Disertasi Ilmu Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus masalah dalam disertasi ini tentang peran Baznas dalam melakukan pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat dan kendala-kendala yang dihadapinya, baik internal maupun eksternal.
8. N. Oneng Nurul Bariyah (2010), "*Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga Pengelola Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik)*. Disertasi Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus masalah dalam disertasi ini pada keharusan menerapkan manajemen mutu pada lembaga pengelola zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang meliputi kepemimpinan, perencanaan strategis, pengelolaan muzaki dan mustahik, pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, sumber daya amil, dan pencapaian hasil. Pengelola zakat harus memegang teguh prinsip-prinsip syari'ah

⁵ A. A. Miftah, "Zakat sebagai Hukum Qada'i dalam Negara Indonesia", *Disertasi Doktor* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan distributif untuk mewujudkan *maqashid al-syari'ah*.

Adapun penelitian tentang penetapan hukuman pelanggar wajib zakat dengan dalil *istishlah* yang peneliti lakukan belum pernah ada yang mengkajinya sampai penelitian ini diselesaikan.

B. Kerangka Pemikiran

1. *Istishlah* sebagai Metodologi Hukum Islam

Istishlah (الاستصلاح) adalah bentuk *mashdar* dari *يُصْلَحُ* – *يُصْلَحُ* yang merupakan bentuk *tsulatsi mazid* dari *al-Shalah* (الصلاح). *Al-Shalah* (الصلاح) berarti kebaikan yang merupakan antonim dari *Fasad* (kerusakan). *Mashlahat* (المصلحة) adalah bahasa arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat. Kata *mashlahat* adalah bentuk *isim mashdar* dengan *wazan* (timbangan) *maf'alah* (مفعلة) yang bermakna sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaat. Bentuk *jama'* (plural) dari kata *mashlahat* adalah *Mashalih* (مَصَالِح).⁶ *Mashlahat* itu sendiri mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahat*.⁷

Istishlah adalah suatu konsep dalam pemikiran hukum Islam yang menjadikan *mashlahah* yang sifatnya tidak terikat (*mursalah*) menjadi suatu hukum sekunder. Karenanya konsep ini lebih dikenal dengan sebutan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Konsep penalaran ini bermula dikembangkan dalam aliran pemikiran hukum Islam Malikiyah.⁸ Hakekatnya konsep ini

⁶ Ibn al-Manzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1956), juz xv, h. 348.

⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke-3, h. 117.

⁸ Ali Yafie, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah: Kosep-konsep Istihsan, Istishlah, Dan Mashlahat Al-Ammah*, Editor: Budhy Munawar-Rachman (Jakarta: Yayasan paramadina, 1994), h. 365.

telah dikenal dan digunakan oleh angkatan pertama *ahl al-ijthad*, kalangan Sahabat dan *Tabi'in*. Dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali dari aliran Syafi'iyah dengan beberapa penyempurnaan. Namun konsep ini ditolak oleh aliran Zhahiriyyah dan Syi'ah.⁹

Ulama *ushul fiqh* menggunakan beberapa peristilahan yang berbeda berkaitan dengan metode mencari kemaslahatan. Sebagian ulama menggunakan istilah *al-Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة), ada pula yang menggunakan *al-Munasib al-Mursal* (المناسب المرسل) oleh Ibu Hajib dan Baidawi, *al-Istidlal al-Mursal* (الاستدلال المرسل) oleh Syatibi, atau *al-Istishlah* (الاستصلاح) oleh Al-Ghazali.

Rahmat Syafe'i menjelaskan bahwa dari ketiga istilah itu meskipun tampak menuju kepada satu tujuan, akan tetapi memiliki tinjauan yang berbeda-beda. Pertama, dari segi kemaslahatan yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Kemaslahatan ditinjau dari segi ini disebut *al-Mashlahah al-Mursalah* (kemaslahatan yang terlepas dari dalil khusus) tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum *syari'at* Islam. Misalnya pembuatan akta nikah dinilai memiliki kemaslahatan sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Kedua, dari segi sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya pembuatan akta nikah itu mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain menjaga status keturunan. Ketiga, dari segi proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Proses seperti ini disebut *Istishlah* (menggali dan menetapkan suatu kemaslahatan). Istilah *al-Istishlah* dipakai oleh Al-Ghazali dalam kitabnya, *Al-Mustashfa*.¹⁰

Alasan *Jumhur* ulama menetapkan *mashlahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 118.

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia karena risalah Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat sekalian alam. Firman Allah dalam QS. Al-Anbiya', 21: 107

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, keseluruhan ketentuan dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat.

- 2) Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Pembentukan hukum harus terus digali sesuai kehendak *Syari'* untuk menjaga kemaslahatan manusia yang terus berkembang.
- 3) Perbuatan yang pernah dilakukan Sahabat, seperti Umar ibn Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada para *muallaf*, Abu Bakar mengumpulkan Alquran atas saran Umar ibn Khaththab, dan menuliskan Alquran pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affan.

Al-Syatibi (w. 780 H), sebagai salah seorang ulama yang banyak membahas dalil hukum ini, mengatakan bahwa sesungguhnya tujuan utama Allah Swt mensyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹¹ Karena itu *taklif* dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut.

Dalam rangka memfungsikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan, yaitu: 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratannya, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada

¹¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Riyadh: Maktabat al-Riyadh al-Haditsah, t.th.), h. 6.

akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita, bukan lagi di tangan pria, adalah maslahat palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami. 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau Hadis, atau bertentangan dengan *ijma'*.

Penguasa harus serius dan bersungguh-sungguh memperhatikan kemaslahatan sebagai beban amanah mengurus segala urusan masyarakat. Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya terkait dengan kemaslahatan"

Zakat sarat dengan nilai kemaslahatan yang berdimensi *syakhsyah* dan *jama'iyah*. Menggunakan perspektif zakat sebagai sesuatu yang bernilai maslahat akan memberi manfaat yang positif dalam pembangunan bangsa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara dan problematika masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Begitu juga menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggar zakat merupakan bagian dari *mashlahat mursalah*, bahkan Umar bin Khattab merubah pendapatnya tatkala mendengar penjelasan Abu Bakar terhadap sekelompok yang tidak membayar zakat..

2. Teori Sanksi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi didefinisikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan. Sanksi dibuat untuk menjaga kepentingan antar individu yang meliputi hak dan kewajibannya, dimana bila individu meninggalkan kewajibannya maka akan mengurangi hak individu lain. Demi menjaga kesinambungan hak dan kewajiban ini maka dibuat suatu formula berbentuk sanksi.

Terminologi perbuatan pidana yang digunakan dalam hukum Islam adalah *jarimah*, yang merupakan sinonim dengan *jinayat*, yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *Syara'*. *Jarimah* juga sinonim dengan tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik.¹² Sementara dari Inggris, istilah yang digunakan adalah teori pembedaan (*condemnation theory*), yang bermakna menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.

Agama Islam membawa hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia. Hukum-hukum Islam tidak hanya mengatur manusia untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan dunia saja, sebab hukum Islam juga terkait dengan tujuan kebaikan masa depan manusia yang pasti dijalani yaitu kehidupan akhirat. Hukum Islam yang berdimensi kebaikan dunia-akhirat mengantarkan pada pemahaman bahwa pelaksanaan atau pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah akan mendapat konsekuensinya, baik pada kehidupan dunia atau akhirat.

Salah satu konsekuensi yang menjadi fokus analisa penelitian ini adalah sanksi atau hukuman terhadap pelanggar hukum Islam. Dalam hukum Islam, hukuman terhadap pelanggaran perbuatan disebut dengan istilah '*uqubah* (العقوبة). '*Uqubah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *isim mashdar* dari '*aqaba-yu'aqabu*, '*iqab* dan *mu'aqabatan* (عاقب - يُعاقب - مُعاقبة و عقابا). Secara bahasa berarti pembalasan dengan keburukan,¹³ dengan kata lain yaitu memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan atas seseorang karena telah melakukan perbuatan pidana. Sedangkan secara terminologi, '*uqubah* dikatakan seperti yang didefinisikan berikut ini:

العقوبة هي جزاء من الشارع للرد عن ارتكاب ما نهى وترك ما امر به¹⁴

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-2, h. 1, dan lihat Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke-5, h. 1.

¹³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), cet. ke-17, h. 518.

¹⁴ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Zaid al-Arubah, 1961), cet. ke-2, h. 9.

“Uqubah adalah suatu balasan yang diberikan oleh Allah untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan dan pengabaian terhadap kewajiban”

Abdul Qadir ‘Audah memberi definisi hukuman atau ‘uqubah sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع¹⁵
“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat terhadap pendurhakaan perkara yang ditetapkan oleh Allah”

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukuman dalam hukum Islam adalah: (1) hukuman merupakan sesuatu yang ditetapkan Allah, (2) hukuman merupakan suatu balasan atas pelaku pidana, (3) hukuman memiliki daya untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan (4) hukuman dapat berfungsi menjaga kemaslahatan hidup manusia.

Seumpama hal di atas bisa juga dilihat pendapat Abu Zahrah yang menyatakan bahwa tujuan sanksi dalam fikih Islam ada dua yaitu: (1) melindungi kebaikan dan menjaga masyarakat dari menghakimi sendiri, dan (2) kemaslahatan umum.¹⁶

Eksistensi sanksi atau hukuman dalam hukum Islam sesungguhnya adalah untuk menjaga manusia agar senantiasa berada dalam kebaikan. Pemberian sanksi dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai bagian dari cara mencapai *maqashid al-syari'ah*, yaitu suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya.¹⁷

¹⁵ Abdul Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), cet. ke-2, juz i, h. 609.

¹⁶ Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah wa al-'Uqubat fi al-Fiqh al-Islami* (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 28.

¹⁷ Kaidah *ushuliyah tasyri'iyah* diambil oleh ulama *ushul fiqh* dari penelitian hukum syari'ah, penelitian *illat-illatnya* dan berbagai hikmah dari pembentukan hukumnya atau berbagai nas yang menetapkan berbagai dasar pembentukan hukum secara umum serta dengan prinsip-prinsip

Sebagian besar teori hukum selain hukum Islam juga memandang kedudukan sanksi sebagai sesuatu yang niscaya. Mereka mengamati bahwa secara eksplisit (tegas, gamblang) maupun implisit (tidak dinyatakan secara tegas), norma yang membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya adalah eksistensi paksaan atau sanksi.¹⁸ Bahkan menurut kaum positivis, unsur paksaan dikaitkan dengan pengertian tentang hierarki perintah secara formal, yakni ia harus tertulis juga.

Pada konteks Indonesia, negara ini juga memiliki hukum tertulis terhadap perkara pidana atau pelanggaran aturan lainnya. Bentuk-bentuk hukuman kasus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁹ Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; (4) pidana denda; dan (5) pidana tutupan. Pidana tambahan merupakan tambahan pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku pidana. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi: (1) pencabutan hak-hak tertentu; (2) perampasan barang-barang tertentu; dan (3) pengumuman putusan hakim.

Institusi yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan sah untuk ditaati oleh masyarakatnya. Sehingga suatu peristiwa pelanggaran hukum tidak bisa dieksekusi secara individual.

hukum yang umum. Kaidah-kaidah itu harus diperhatikan dalam menetapkan hukum dari nas dan dalam kasus yang tidak ada nasnya. Kaidah ini meliputi maksud umum penetapan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), hak-hak Allah dan hak *mukallaf*, kebolehan berijtihad, penghapusan hukum (*nasakh*), dan pertentangan dalil.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, h. 73.

¹⁹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Dilakukan kajian yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan normatif, baik tertulis dan tidak tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan.

Penelitian hukum normatif sering mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Dengan demikian melacak bahan dari pustaka atau *library research* merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Penelitian ini menelaah berbagai bahan pustaka yang ditemui lalu disusun secara sistematis dengan prinsip relevansi terhadap masalah yang akan diteliti, sebagaimana lazimnya metode penelitian normatif yaitu sebagai metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-4, h. 13.

B. Jenis Data

Sesuai dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, yuridis, dan historis, maka jenis data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yang diperoleh dalam perpustakaan. Disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Sumber Data

Ketepatan dalam menentukan sumber data menjadi kunci sukses penelitian. Validitas data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh penentuan sumber data.²¹

1. Sumber Data Primer

Penelitian ini adalah penelitian penetapan hukuman pelanggar wajib zakat dengan dalil *istishlah*. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini adalah Alquran dan Hadis.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah pendapat-pendapat ahli Islam seperti yang dapat digali dari beberapa kitab tafsir Alquran untuk mengetahui tafsiran tentang zakat, buku-buku fikih, hasil penelitian, pendapat hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar serta situs web, dan lain-lain.

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, tata negara, dan ekonomi.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 211.

B. Jenis Data

Sesuai dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, yuridis, dan historis, maka jenis data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yang diperoleh dalam perpustakaan. Disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Sumber Data

Ketepatan dalam menentukan sumber data menjadi kunci sukses penelitian. Validitas data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh penentuan sumber data.²¹

1. Sumber Data Primer

Penelitian ini adalah penelitian penetapan hukuman pelanggaran wajib zakat dengan dalil *istishlah*. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini adalah Alquran dan Hadis.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah pendapat-pendapat ahli Islam seperti yang dapat digali dari beberapa kitab tafsir Alquran untuk mengetahui tafsiran tentang zakat, buku-buku fikih, hasil penelitian, pendapat hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar serta situs web, dan lain-lain.

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, tata negara, dan ekonomi.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 211.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum.

Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

E. Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode tersebut merupakan metode analisis Miles dan Huberman. Uraian singkat jalur-jalur tersebut adalah sebagai berikut:²²

a. Reduksi data

Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan. Sehingga memudahkan pemahaman dan perencanaan kerja penelitian selanjutnya. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan

²² Mathew B. Mills dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2009), h. 15-21.

pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

- 1) memikir ulang selama penulisan.
- 2) tinjauan ulang catatan lapangan.
- 3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
- 4) upaya-upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data dalam penelitian yang telah dikumpulkan disederhanakan agar bisa dipahami, dianalisis dan diambil kesimpulannya. Sehingga diharapkan dari proses analisis data ini ditemukan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Proses pemilihannya harus tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga hasil dari analisis ini akan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Peningkar Zakat

1. Peningkar Zakat dalam Alquran

Perintah menunaikan zakat diiringi dengan ayat-ayat ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya. Secara umum, ancaman-ancaman tersebut berupa pemberian hukuman yang pasti akan diberikan kepada para peningkar zakat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Beberapa ayat Alquran yang menyatakan sanksi/hukuman tersebut adalah:

a) QS. Ali Imran, 3: 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ * وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ * وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini adalah dalil wajib zakat. Dikatakan sebagai dalil hukum wajib zakat karena ada ancaman terhadap orang yang tidak menunaikan zakat. Ayat ini memang tidak secara *sharih* menyatakan kalimat perintah zakat, namun ancaman yang *sharih* dalam ayat di atas dipastikan terkait dengan perintah wajib melaksanakan zakat yang dapat ditemukan pada ayat-ayat lain.

Ibn al-'Arabi berpandangan bahwa QS. Ali Imran ayat 180 di atas adalah sebagai dalil kewajiban zakat yang ditunjukkan dari adanya ancaman terhadap orang yang

mengingkari atau meninggalkannya.²³ Terlebih lagi bila ia berbuat bakhil disertai anggapan bahwa itu akan membawa kebaikan baginya maka secara nyata dalam ayat tersebut dikatakan sebagai sebuah anggapan yang keliru. Menurut Ali al-Shabuni²⁴ kebakhilannya tersebut akan memberi dampak *mudharat* bagi agamanya.²⁵

Pengertian penting tentang orang bakhil dalam ayat tersebut di atas, menurut Al-Thabari, adalah orang yang tidak membayar zakat. Argumentasinya adalah nyatanya hadis-hadis Rasul Saw yang menafsirkan firman Allah (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة), seperti sabda Rasul Saw: “Orang bakhil adalah orang yang mencegah hak Allah darinya. Kelak Allah akan mendatangkan ular di lehernya.”²⁶ Begitu juga Ismail Haqqi al-Buruswi menegaskan bahwa bakhil artinya menolak untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan menolak untuk melakukan perbuatan sunat tidak disebut bakhil.²⁷

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa hukuman orang yang tidak menunaikan zakat meliputi sanksi dunia dan akhirat. Ayat di atas menjadi dalil keharaman tidak melaksanakan perintah zakat.²⁸ Adapun hukuman dunia juga harus diberikan terhadap oknum pelanggar wajib zakat sebab kelalaian dan kealpaannya tersebut. Hukumannya berupa pengambilan zakat

²³ Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 303.

²⁴ Prof. DR. Muhammad Ali Al-Shabuni lahir di Aleppo, Suriah, 1 Januari 1930, adalah seorang *mufasssir* dan ulama yang berasal dari Suriah, dan merupakan salah seorang Guru Besar Ilmu Tafsir.

²⁵ Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, jilid 1 (Kairo: Dar al-Shabuni, t.th.), h. 341.

²⁶ Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, jilid 3, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 532.

²⁷ Ismail Haqqi al-Buruswi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, terj. Prof. Dr. H.M.D. Dahlan, juz iv, cet. i (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), h. 1996, h. 304.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 3, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 1793.

itu dari dirinya, memberinya hukuman dengan *ta'zir*, memberinya denda, atau hakim mengambil sebagian hartanya dengan paksaan.²⁹ Pada intinya, mereka harus diberi hukuman di dunia karena tidak mengeluarkan hak orang-orang yang berhak atas harta yang mereka miliki.

b) QS. Al-Taubah, 9: 34-35

﴿ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ * وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Kata Ibn Umar, ayat (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengumpulkan harta dan tidak menunaikan zakatnya sebagai orang yang

²⁹ Ibid.

celaka.³⁰ Orang yang mengumpulkan emas dan perak dan menahannya agar tidak dikeluarkan kewajiban atas hartanya (baik dengan cara ditimbun dalam tanah atau di simpan dalam kas tabungan) dapat dipahami sebagai individu yang dimaksud oleh ayat di atas. Dalam perkataan orang Arab, *al-kanzu* artinya kumpulan dan perkara yang sebagian disatukan dengan sebagian yang lain, maka perkara itu disebut *maknuz* (yang dikumpulkan). Emas disebut *dzahab* (ذهب) karena ia suka pergi dan tak tersisa. Dan perak disebut *fidhdhah* (فضة) karena ia suka bercerai-berai dan tidak tersisa. Dari definisinya saja cukup dijadikan petunjuk bagi kefanaan keduanya dan bahwasanya ia tidak kekal dan lenyap.³¹

Difirmankan pada ayat di atas "*wa la yunfiquna fi sabilillah*" (dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah), yakni mereka tidak menginfakkan sebagian dari harta benda yang disimpannya itu, yaitu tidak menunaikan kewajiban zakat.

c) QS. Al-Taubah, 9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Ayat di atas, menurut para ulama, ditujukan kepada Nabi Muhammad dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah dan kepala negara (penguasa politik).³² *Khithab* ayat di atas adalah Nabi Muhammad dan pada periode setelahnya juga

³⁰ Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, h. 929.

³¹ Ismail Haqqi al-Buruswi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, terj. Prof. Dr. H.M.D. Dahlan, juz x, cet. i (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), h. 293.

³² Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Kairo: Muhammad Ali Shabih, 1953), juz iii, h. 47.

tertuju pada setiap orang yang memangku jabatan yang mengurus persoalan umat. Dengan dasar ayat tersebut, para *fugaha* menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan dan pemaksaan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.³³

Walaupun perintah Allah dalam QS. Al-Taubah, 9 ayat 103 di atas pada lahirnya di-*khithab*-kan kepada RasulNya, dan sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

d) QS. Al-Qalam, 68: 17-20

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۖ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۗ فَطَافَ عَلَيْهَا طَافٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ۚ فَأَصْبَحَتِ كَالصَّرِيمِ ۚ

"Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari. Dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin). Lalu

³³ Syaqui Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, terj. *Al-Thathbiq Al-Mu'ashir Li al-Zakah* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), h. 21-24. Dalam uraiannya menghimpun riwayat pengumpulan zakat di masa Nabi dan Khulafaurrasyidin serta pendapat para ulama tentang kewajiban pembayaran zakat kepada pemerintah. Lihat juga: Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 107-107.

kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita."

Alquran tidak selalu menggunakan kalimat seruan dalam mengajak kebaikan. Beberapa kali Allah menyeru kebaikan dalam Alquran melalui kisah-kisah. Ayat di atas mengisahkan tentang para pemilik kebun yang ditimpakan bala oleh Allah ketika mereka melarang orang-orang miskin mencicipi hasil kebun mereka dan bersikap kikir atas karunia Allah.

Ibrah yang bisa dipetik dari ayat di atas adalah: Pertama, jika kisah tersebut merupakan kisah yang benar-benar terjadi, maka ini merupakan peringatan untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan kurang mampu karena dalam harta orang yang bertaqwa ada hak fakir miskin baik yang minta maupun yang tidak meminta. Walaupun kita telah berzakat, kita tetap dianjurkan membantu fakir miskin yang ada disekitar kita jika kita memang mampu. Kedua, *ibrah* lainnya yaitu sesungguhnya azab Tuhan itu bisa terjadi seketika dan kapan saja, sehingga jangan pernah merasa aman dari azab.

2. Peningkar Zakat dalam Hadis

Rasulullah Saw yang berkedudukan sebagai sosok sentral penjelas utama dalam hukum Islam telah memberi banyak keterangan tentang sanksi zakat. Beberapa sabda Rasul yang terkait dengan orang yang tidak berzakat adalah Hadis-hadis berikut:

a) Hadis riwayat Muslim dan Ahmad

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak seorang pun pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya kecuali hartanya itu akan dipanggang di atas api neraka, lalu dijadikan lempengan-lempengan, kemudian diseterikakan pada dua lambungnya dan dahinya sehingga Allah menghadili hamba-hambaNya pada suatu hari yang (lamanya) kira-kira lima puluh ribu tahun, lalu ia diperlihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Dan tidak ada seorang pun pemilik unta yang tidak mengeluarkan

zakatnya melainkan untuk unta-unta itu disediakan tanah datar yang sangat luas yang cukup memuat semuanya untuk berjalan di atas pemiliknya. Setiap kali unta yang terakhir usai melintasinya maka unta yang pertama dikembalikan lagi sampai Allah selesai mengadili hamba-hambaNya pada suatu hari yang (lamanya) kurang lebih lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalannya, mungkin ke surga mungkin pula ke neraka. Dan tidak ada seorang pun pemilik kambing yang tidak menunaikan zakatnya kecuali untuk kambing-kambing itu disediakan tanah datar yang luas yang cukup memuat semuanya. Lalu kambing-kambing itu menginjak-injaknya dengan teracaknya dan menandukinya dengan tanduknya. Tiada seekor kambing pun yang tanduknya melingkar dan tiada pula yang tidak bertanduk. Setiap kali kambing yang terakhir melintasinya, yang pertama dikembalikan lagi sampai Allah mengadili hamba-hambaNya pada suatu hari yang (lamanya) jura-kira lima puluh ribu tahun dari hari yang kamu hitung. Kemudian diperlihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Mereka bertanya: Kalaupun kuda, bagaimana ya Rasulullah?. Beliau menjawab: Kuda itu pada jambulnya terdapat – atau beliau bersabda: Kuda itu diikatkan pada jambulnya – kebaikan sampai hari kiamat. Kuda itu ada tiga macam. Ada yang mendatangkan pahala bagi seseorang, ada yang menjadi pelindung bagi seseorang, dan ada yang menimbulkan dosa bagi seseorang. Kuda yang mendatangkan pahala ialah seseorang menggunakan dan menyiapkannya untuk sabilillah, maka kuda itu tidak menyembunyikan apapun di dalam perutnya kecuali Allah menetapkan pahala bagi orang tadi. Jika dia memberinya minum dari sungai maka tiap tetes yang dimasukkannya ke dalam perutnya ada pahala bagi orang tersebut sampai-sampai beliau menyebutkan adanya pahala di dalam air kencing dan kotorannya. Dan kalau ia berlari pulang-pergi sekali atau dua kali maka dengan setiap langkah yang diayunkannya ditetapkan pahala bagi orang itu. Adapun kuda yang menjadi pelindung bagi pemiliknya ialah seseorang menjadikannya untuk kesenangan dan keindahan, tetapi dia tidak melupakan hak punggung dan

perut kudanya itu, baik di waktu kuda itu sulit maupun mudah. Adapun kuda yang menyebabkan dosa ialah seseorang yang menggunakannya untuk berlagak, menentang hak dan dipamerkan kepada orang-orang, maka yang demikian itulah yang menyebabkan dosa. Mereka bertanya: Lalu kalau keledai ya Rasulullah?. Beliau menjawab: Allah tidak menurunkan apapun kepadaku selain ayat yang menyeluruh dan umum ini, yaitu: Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun pasti dia akan melihatnya. Dan siapa melakukan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihatnya. (HR. Ahmad dan Muslim).³⁴

Perkataan harta (*kanzun*): Imam Abu Ja'far al-Thabari berkata: *Al-Kanzu* ialah harta yang dikumpulkan, baik yang berada di dalam perut bumi atau yang ada di permukaannya. Qadhi 'Iyadh berkata: Para ulama *salaf* berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksudkan dengan lafal *al-Kanzu* yang disebutkan di dalam Alquran dan Hadis ini. Sebagian besar mengatakan bahwa itu adalah semua harta yang sudah dikeluarkan zakat, tidak disebut *kanzu*. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan apa yang disebutkan dalam ayat Alquran adalah Ahli Kitab. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *al-Kanzu* adalah semua harta yang melebihi 4000 dinar, meski belum dizakati.³⁵

b) Hadis riwayat jama'ah

Dari Abu Hurairah: Ketika Rasulullah Saw wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, sementara orang-orang Arab ada yang murtad. Umar bertanya (kepada Abu Bakar): Mengapa kamu memerangi orang-orang itu? Padahal Rasulullah Saw telah bersabda: Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sampai mereka mengucapkan "Tiada tuhan selain Allah". maka siapa yang mengucapkannya berarti ia telah menjaga harta dan jiwanya dari (serangan)ku kecuali dengan haknya, sedang perhitungannya ada pada

³⁴ Al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2005), cet. ke-1, jilid v, h. 238-239.

³⁵ *Ibid.*

Allah. Abu Bakar menjawab: Demi Allah, aku tetap akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka tidak mau menyerahkan seekor anak kambing kepadaku yang dulu mereka pernah menyerahkannya kepada Rasulullah Saw, niscaya aku akan memerangi mereka karena ketidakmauannya itu. Umar berkata: Demi Allah, hal itu tiada lain karena Allah telah membukakan dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka), maka aku tahu bahwa hal itu benar (HR. Jamaah kecuali Ibn Majah). Tetapi di dalam riwayat Muslim, Turmudzi dan Abu Dawud (dikatakan): Kalau mereka menghalangi aku untuk mengambil 'iqal yang pernah mereka serahkan... dst, sebagai ganti lafal 'anaqan (anak kambing).³⁶

Perkataan "sementara orang-orang Arab ada yang murtad", Al-Khatthabi berkata: Kaum murtad ada dua golongan. Pertama adalah golongan yang berpaling dari agama sama sekali dan berpindah kepada kekufuran. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah. Golongan ini terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Musailamah al-Kadzdzab dan kelompok Al-Aswad al-'Anasi. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Oleh karena itu Abu Bakar memerangi mereka sampai Musailamah terbunuh di Yamamah, dan Al-'Anasi dibunuh di Shan'a. Kelompok kedua adalah golongan yang murtad, tidak mengakui syariat, tidak mau mengerjakan shalat, zakat dan sebagainya, serta kembali kepada apa yang pernah mereka lakukan di zaman Jahiliyah. Mereka tidak mau bersujud kecuali di tiga tempat, yaitu masjid Makkah, masjid Madinah, dan masjid Abdul Qais.

Golongan kedua adalah orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat. Mereka tidak mengakui wajibnya zakat dan kewajiban menyerahkan zakat kepada penguasa. Mereka itu sesungguhnya termasuk kategori *ahl al-baghyi* (kaum pemberontak). Hanya saja pada waktu itu mereka tidak disebut

³⁶ *Ibid.*, h. 243.

"ahl al-baghyi" karena mereka masuk ke dalam golongan orang-orang murtad. Sebenarnya diantara mereka itu ada yang bersedia mengeluarkan zakat dan tidak menolaknya. Hanya saja para pemimpin mereka menghalangi mereka untuk melakukan hal itu. Misalnya Bani Yurbu', mereka sudah mengumpulkan zakat mereka dan bermaksud akan mengirimkannya kepada Abu Bakar tetapi dicegah oleh Malik bin Nuwairah. Lalu zakat itu dibagi-bagikannya diantara mereka sendiri. Dalam masalah mereka itu muncul perbedaan pendapat dan terjadilah kesamaran bagi Umar bin al-Khattab. Oleh karena itulah dia mendebat Abu Bakar dan berhujjah dengan sabda Nabi Saw "... Aku diperintahkan supaya memerangi manusia... dst". Dan ini, dari Umar, adalah bergantung pada lahiriahnya sabda Nabi Saw sebelum menganalisa kelanjutannya dan merenungkan syarat-syaratnya. Lalu Abu Bakar menjawab bahwa zakat itu haknya harta. Maksudnya *qadhiyah*³⁷ itu mengandung pemeliharaan darah dan harta dengan digantungkannya pada syarat-syaratnya.³⁸ Dan hukum terpeliharanya darah dan harta yang digantungkan pada dua syarat tidak dapat terlaksana karena hanya ada satu syarat saja yang terpenuhi, sedang yang satunya tidak terpenuhi. Kemudian Abu Bakar membandingkan hukum itu dengan shalat dan mengembalikan zakat kepada masalah shalat. Maka hal itu menunjukkan bahwa memerangi orang yang enggan melakukan shalat itu sudah menjadi *ijma'* para Sahabat. Oleh karena itu Abu Bakar mengembalikan masalah yang diperselisihkan (yakni terpelihara dan tidaknya jiwa orang yang enggan membayar zakat) kepada masalah yang sudah disepakati.³⁹

³⁷ *Qadhiyah*: dalam masalah ini adalah pernyataan Nabi saw bahwa orang yang sudah mengucapkan *La ilaha illa Allah*, maka jiwa dan hartanya akan dilindungi, kecuali dengan hak harta itu sendiri.

³⁸ Syarat-syaratnya yaitu mengucapkan *la ilaha illa Allah*, dan memenuhi hak harta. jadi kalau yang ada hanya satu syarat saja, yaitu pengucapan *La ilaha illa Allah*, sedang pemenuhan hak harta tidak ada maka pemeliharaan jiwa dan harta mereka tidak dapat dilaksanakan.

³⁹ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, h. 234-235.

Segolongan kaum Rafidhah (dari aliran Syi'ah) menganggap bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menangkapi kaum muslimin. Mereka beranggapan bahwa firman Allah "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka*" adalah khithab yang khusus ditujukan kepada Nabi Saw saja, tidak menjangkau selain beliau. Dan penarikan zakat itu diikat dengan beberapa syarat yang tidak terdapat pada orang selain beliau, yaitu orang yang mengambil zakat itu dapat membersihkan, mensucikan dan mendoakan orang yang menunaikan zakat. mereka beranggapan pula bahwa memerangi kelompok yang enggan membayar zakat itu adalah tindakan yang serampangan.

c) Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Abu Daud

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Pada setiap unta yang mencari makan sendiri dalam jumlah setiap empat puluh ekor, (zakatnya) sekor bintu labun: seekor unta pun tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya. Siapa mengeluarkan zakat karena mencari pahala maka ia akan memperoleh pahalanya. Dan siapa enggan mengeluarkannya maka aku akan mengambilnya beserta separuh untanya. Demikian itu adalah suatu kewajiban dari beberapa kewajiban yang ditetapkan Tuhan kami. Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun dari zakat itu. (HR. Ahmad, Nasai, dan Abu Dawud).⁴⁰

Perkataan "maka aku akan mengambilnya" ini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa penguasa boleh memungut zakat secara paksa apabila si pemilik harta tidak rela, dan zakatnya sudah jadi cukup dengan niatnya penguasa, sebagaimana pendapat Syafi'i dan golongan Hadawiyah; dan menunjukkan pula bahwa kekuasaan untuk menerima zakat itu

⁴⁰ *Ibid.*, h. 239.

berada di tangan penguasa, demikian pendapat Atrah, Abu Hanifah, dan rekan-rekannya.⁴¹

Perkataan “separuh hartanya”, maksudnya sebagian hartanya. Ini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa penguasa boleh memberi sanksi dengan mengambil harta. demikian pendapat Syafi’i dalam *qaul qadimnya*, tetapi kemudian ia menarik kembali pendapatnya itu dan menyatakan bahwa hukum tersebut dihapuskan. Begitu pula dikatakan oleh Baihaqi dan sebagian besar golongan Syafi’i. Syafi’i menduga bahwa yang menjadi *nasikh* (penghapus) adalah hadis tentang perusakan oleh untanya Barra’, karena Nabi Saw dalam kasus tersebut menetapkan penggantian barang yang telah dirusak oleh unta tadi, dan tidak diriwayatkan bahwa beliau melipatgandakan gantinya. Tetapi tentu bahwa tidak adanya tindakan beliau mengambil harta sebagai sanksi dalam kasus tersebut tidak mengharuskan tidak adanya sanksi sama sekali, dan hal itu tidak tepat dijadikan pegangan untuk menetapkan bahwa memberi sanksi dengan cara mengambil harta itu tidak boleh, dan tidak tepat pula dijadikan *nasikh*. Menurut Imam Yahya dan golongan Hadawiyah, boleh menjatuhkan sanksi berupa pengambilan harta. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil, yaitu: (1). Hadisnya Bahz ini, (2). Keinginan Nabi Saw membakar rumah orang-orang yang tidak ikut shalat jamaah, (3). Hadisnya rumah orang-orang yang tidak ikut shalat jamaah, (4). Hadisnya Umar yang diriwayatkan Abu Dawud (Nabi Saw bersabda: “*Apabila kamu mendapati seorang laki-laki menggelapkan rampasan perang, bakarlah barang-barangnya.*” Tetapi di dalam sanadnya terdapat Shalih bin Muhammad bin Zaidah al-Madini, yang menurut Bukhari periwayatannya tidak dapat dijadikan hujjah), (5). Hadisnya Ibn Amr bin ‘Ash yang diriwayatkan Abu Dawud, Hakim, dan Baihaqi, bahwa Nabi Saw, Abu Bakar dan Umar pernah membakar barang-barang orang yang menggelapkan rampasan perang dan mereka memukulnya. Namun dalam sanadnya terdapat Zuhair bin Muhammad, yang konon tidak diketahui

⁴¹ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, h. 250.

identitasnya, (6). Hadis tentang denda terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang, yaitu dia di samping harus mengembalikan barang tersebut juga harus menyerahkan barang yang sama.⁴²

d) Hadis Riwayat Bukhari

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang diberi harta kekayaan oleh Allah namun ia tidak memberikan zakatnya, pada hari kiamat akan disediakan baginya seekor ular yang mematukkan kedua giginya yang berbisa, akan melilitnya pada hari kiamat, kemudian akan mencengkeram kedua rahangnya. Lalu ular itu berkata: "Aku adalah hartamu. Aku adalah gudang hartamu. Kemudian ular itu membaca ayat: "Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil... dst."⁴³

B. Hukuman Pelanggar Wajib Zakat menurut *Fuqaha*

Fuqaha sepakat bahwa muslim yang tidak membayar zakat harus diambil hartanya senilai wajib zakat yang harus dikeluarkannya dan muslim itu dikenai hukuman yang bentuknya tergantung kebijaksanaan penguasa.⁴⁴

Secara konseptual, hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat dapat ditetapkan dalam hukum perundang-undangan yang merupakan tugas negara melaksanakannya. Dasarnya adalah sabda Rasul Saw sebagai berikut:

"... Barangsiapa yang memberikan zakat dengan mengharapkan pahala maka pahala itu adalah untuknya. Dan barang siapa yang mencegahnya maka kami akan mengambilnya dan separuh dari hartanya, sebagai suatu kewajiban yang diberatkan dari beberapa kewajiban

⁴² *Ibid.* h. 250-251.

⁴³ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Maktabah Syamilah), juz v, h. 210.

⁴⁴ Syafi'i berpendapat dalam *qaul qadim* bahwa orang yang tidak menunaikan kewajiban zakat harus diambil sebagian hartanya di samping harta yang wajib dikeluarkan. Hanafi berpendapat bahwa orang itu harus dipenjara hingga ia mengeluarkan zakat tetapi tidak diambil hartanya secara paksa.

Tuhan kita. Tidak boleh bagi keluarga Muhammad Saw untuk mengambil zakat sedikitpun."

Yusuf Qaradhawi memberikan penjelasan terhadap Hadis di atas sebagai berikut:⁴⁵

- Bahwa sesungguhnya dasar dalam pemberian zakat itu adalah mengharapkan pahala dari Allah Swt.
- Bahwa bagi mereka yang tidak mau membayar zakat harus diambil tindakan secara tegas dengan kekuatan negara. Bahkan dapat ditambah lagi dengan mengambil separuh dari hartanya sebagai hukuman *ta'zir*.
- Bahwa hukuman itu bermaksud untuk menyelamatkan hak fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya.

Sebelum Yusuf Qaradhawi mengemukakan pendapatnya di atas, Ibn Qudamah (w. 620 H) pun telah menyatakan bahwa orang yang meyakini kewajiban zakat namun ia menolak untuk membayarnya maka Imamlah yang mengambilnya dan orang tersebut dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Demikian pula halnya dengan orang yang menyimpan hartanya sehingga zakatnya tidak dikeluarkan.⁴⁶

Syatibi menyebutkan bahwa *jinayat* disyariatkan untuk preventif (pencegahan) dan persuasif (bujukan) agar lima hal asasi yang dijaga *maqashid al-syariah* tidak terganggu. Intinya bahwa pembedaan pada hakikatnya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi, perbuatan murtad digolongkan sebagai pidana adalah dalam rangka memelihara agama, perbuatan meminum minuman memabukkan digolongkan sebagai pidana adalah dalam rangka memelihara akal, perbuatan membunuh digolongkan sebagai pidana adalah dalam rangka menjaga jiwa, perbuatan zina digolongkan sebagai pidana adalah dalam rangka memelihara keluarga dan

⁴⁵Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), cet. ke-21, juz i, h. 77-78.

⁴⁶ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 378.

keturunan, dan perbuatan mencuri atau merampok digolongkan kejahatan adalah dalam rangka untuk memelihara harta. Lima hal pokok itulah pada hakikatnya yang dipelihara oleh syari'at.

Merujuk konsep *maqashid al-syariah* seperti yang telah dicontohkan di atas, maka dapat dipahami bahwa memberikan sanksi kepada pelanggar wajib zakat adalah dalam rangka mencapai kemaslahatan pada dua sisi, yaitu sisi individu yang tidak mengerjakan zakat dan sisi lain adalah kemaslahatan yang diraih dari perbuatan individu tersebut dari zakatnya.

Kemaslahatan pada sisi individu yang tidak mengerjakan zakat adalah:

- menjaga agamanya karena zakat adalah rukun Islam,
- membersihkan harta dan mensucikan jiwa muzaki,
- menjadi pribadi yang saleh. Pribadi yang saleh adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Adapun kemaslahatan yang diraih dari sejumlah harta tertentu (berdasarkan perhitungan *nishab* dan *haul*)⁴⁷ dari individu yang membayar zakat adalah perolehan dana yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah finansial yang termasuk dalam delapan golongan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Praktik perdana pemberian sanksi hukum dilakukan oleh Khalifah pertama, Abu Bakar as, yang bertekad memutuskan perang terhadap orang yang mau mengerjakan shalat tetapi secara sadar dan sengaja enggan berzakat. Kebijakan Abu Bakar diriwayatkan sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah: Ketika Rasulullah Saw wafat dan Abu Bakar menduduki kursi khalifah, banyak orang-orang Arab yang murtad. Lalu Umar bertanya: "mengapa engkau

⁴⁷ *Nishab* adalah jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Haul* adalah Jangka waktu yang ditentukan pada seseorang untuk tempo wajib mengeluarkan zakat.

memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui ketiadaan tuhan selain Allah. Barangsiapa telah mengucapkannya berarti ia telah terpelihara hartanya dan jiwanya dari (peperangan) tersebut melainkan dengan haknya, sedang perhitungannya di tangan Allah.” Lalu Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, sebab zakat itu kewajiban bagi harta. Demi Allah, kalau mereka enggan (menyerahkan) seekor anak kambing kepadaku yang pernah ditunaikannya kepada Rasulullah Saw niscaya aku peranginya karena keengganannya itu.” Umar berkata: “Demi Allah, demikian itu dikarenakan Allah telah menerangi dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka), karena itu aku tahu bahwa hal itu adalah benar.” (HR. Jamaah, kecuali Ibnu Majah).

Kebijakan Abu Bakar terhadap pengingkar zakat seperti telah diceritakan dalam Hadis di atas tidak terlepas dari peristiwa pembangkangan dan kemurtadan yang terjadi setelah Rasulullah Saw wafat. Saat itu banyak orang Arab murtad, Yahudi dan Nasrani menampakkan taringnya, sementara kemunafikan mulai tersebar. Keadan yang darurat berhasil diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar.

Perang terhadap pengingkar zakat adalah kebijakan Khalifah Abu Bakar pada saat ia berkuasa. Ketika muncul sekelompok kaum yang enggan membayar zakat, khalifah lalu bertindak represif (menekan) terhadap mereka dengan memeranginya.⁴⁸ Alasan mereka enggan membayar zakat karena menurut mereka zakat adalah persembahan untuk Rasulullah dengan imbalan bagi mereka akan meraih kesucian,

⁴⁸ Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah ma'a Muzaj li Tarikh al-Khilafah al-Rasyidah* (Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1991), cet. ke-1, h. 512.

memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui ketiadaan tuhan selain Allah. Barangsiapa telah mengucapkannya berarti ia telah terpelihara hartanya dan jiwanya dari (peperangan) tersebut melainkan dengan haknya, sedang perhitungannya di tangan Allah.” Lalu Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, sebab zakat itu kewajiban bagi harta. Demi Allah, kalau mereka enggan (menyerahkan) seekor anak kambing kepadaku yang pernah ditunaikannya kepada Rasulullah Saw niscaya aku perangi mereka karena keengganannya itu.” Umar berkata: “Demi Allah, demikian itu dikarenakan Allah telah menerangi dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka), karena itu aku tahu bahwa hal itu adalah benar.” (HR. Jamaah, kecuali Ibnu Majah).

Kebijakan Abu Bakar terhadap pengingkar zakat seperti telah diceritakan dalam Hadis di atas tidak terlepas dari peristiwa pembangkangan dan kemurtadan yang terjadi setelah Rasulullah Saw wafat. Saat itu banyak orang Arab murtad, Yahudi dan Nasrani menampakkan taringnya, sementara kemunafikan mulai tersebar. Keadan yang darurat berhasil diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar.

Perang terhadap pengingkar zakat adalah kebijakan Khalifah Abu Bakar pada saat ia berkuasa. Ketika muncul sekelompok kaum yang enggan membayar zakat, khalifah lalu bertindak represif (menekan) terhadap mereka dengan memeranginya.⁴⁸ Alasan mereka enggan membayar zakat karena menurut mereka zakat adalah persembahan untuk Rasulullah dengan imbalan bagi mereka akan meraih kesucian,

⁴⁸ Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah ma'a Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rasyidah* (Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1991), cet. ke-1, h. 512.

kebersihan, dan doa dari Rasul.⁴⁹ Tindakan Abu Bakar disetujui oleh para Sahabat yang lain dan bahkan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang pada awalnya sempat mengkritik kebijakan Abu Bakar.⁵⁰ Berdasarkan ini, para ulama menetapkan bahwa siapa saja yang mengingkari dan tidak mengakui adanya perintah zakat maka ia telah jatuh pada kekafiran dan dianggap telah murtad dari Islam.⁵¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara Islam pada masa Abu Bakar menjadi pelopor melancarkan perang demi membela hak-hak fakir miskin dan golongan lemah yang disalurkan oleh golongan-golongan berharta.

Kebolehan menarik zakat secara paksa terhadap mereka yang enggan membayar zakat itu juga dibenarkan oleh Ibn Hazm (w. 456 H). Ibn Hazm menulis dalam bukunya *Al-Muhalla*:

وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد ان يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم⁵²

"Adalah wajib bagi mereka orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri memperhatikan orang-orang fakir mereka dan penguasa dapat memaksakan yang demikian jika zakat-zakat tidak dilaksanakan oleh mereka."

Bahkan Yusuf Qaradhawi tidak mempermasalahkan jika banyak jiwa yang harus melayang demi menjaga eksistensi zakat. Menurutny, darah yang tertumpah demi menegakkan syari'at zakat dikategorikan sebagai syahid.⁵³

Bentuk sanksi terhadap pelanggar zakat tidak ada ditemukan dalam nas Alquran dan Hadis. Sanksi pertama kali pada kasus pelanggaran wajib zakat bermula dari kebijakan

⁴⁹ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islamy* (Mesir: Maktabat al-Nahdah al-Mishriyyah, 1979), juz i, h. 360.

⁵⁰ Isa Abduh, *Al-Nazhm al-Maliyah fi al-Islam* (Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1397 H), h. 136.

⁵¹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 79.

⁵² Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsr* (t.tp: Dar al-Fikr, t.th.), juz iii, h. 156.

⁵³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 79.

Abu Bakar. Kebijakan menetapkan hukum tersebut adalah bentuk *ta'zir* yang diakui legalitasnya dalam hukum Islam. Para *fuqaha* mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang tidak ada ditentukan dalam Alquran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba. *Ta'zir* ialah suatu hukuman yang bersifat pendidikan (*ta'dib*) terhadap perbuatan dosa atau maksiat yang tidak diancam dengan *hadd* atau *kafarah*.⁵⁴

Ta'zir harus diterapkan sesuai tuntutan kemaslahatan, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqh *التعزيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ*. Kedudukan *ta'zir* berdasarkan definisinya dapat dikemukakan bahwa hukuman itu ada yang termasuk hak Allah dan hak manusia. Hak Allah yaitu jika pelanggaran hukum mencederai hubungan seseorang dengan Allah namun tidak membuat manusia rugi akibat perbuatannya. Sedangkan hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hak manusia yaitu pelanggaran hukum akibat manusia dirugikan karena perbuatannya.

Zakat pada satu sisi berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Allah, dan pada sisi lain berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan manusia lainnya. Mengenai hubungan tersebut, pemetaan ketentuan *jarimah*nya adalah sebagai berikut.⁵⁵

Pertama, *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba, di samping harus ada gugatan, *ulu al-amr* tidak dapat memaafkan. Sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan Allah atau masyarakat maka tidak harus ada gugatan dan memungkinkan *ulu al-amr* memberi pengampunan bila hal itu membawa maslahat.

Kedua, *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul*. Dengan demikian sanksinya dijumlah sesuai dengan jumlah kejahatannya. Misalnya bila

⁵⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terj. Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

⁵⁵ Syahrul Anwar, "Hakikat Manusia dan Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Nasional", h. 210.

seorang menghina A, B, C, dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedangkan dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori *tadakhul*. Misalnya seorang yang tidak mengeluarkan zakat beberapa kali maka hanya dikenakan satu kali *ta'zir*.

Ketiga, tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah maka semua orang wajib mencegah. Sesuai dengan sabda Nabi Saw yang dapat dikategorikan sebagai penerapan *nahy munkar*.⁵⁶ Adapun setelah terjadinya pelanggaran, maka hak menjatuhkan hukuman berada di tangan *ulu al-amr*.

Keempat, *ta'zir* yang terkait hak perorangan dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan, sedangkan ia dahulu telah berniat untuk itu. Adapaun *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Mengamati zakat yang pada satu sisi berhubungan antara manusia dengan Allah dan pada sisi yang lain berhubungan antara sesama manusia maka dapat dirumuskan:

1. *ulu al-amr* dapat memberi sanksi untuk mencegah pelanggaran maksiat,
2. *ulu al-amr* harus menjamin hak mustahik zakat,
3. peran masyarakat muslim sangat besar dalam mensosialisasikan hukum wajib zakat.

C. Hukuman Pelanggar Wajib Zakat dengan Dalil *Istishlah*

1. Tujuan Hukuman

Tujuan utama memberi hukuman dalam pemikiran hukum Islam ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan pendidikan (*al-ishlah wa al-tahdzib*),⁵⁷ dimana hukuman

⁵⁶ Sabda Rasul Saw, diriwayatkan oleh Muslim, *Shahih Muslim*, juz i (Maktabah Syamilah), h. 167:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet v (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 255.

tersebut merupakan suatu tindakan yang ditujukan kepada pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana. Pertama, pengertian tujuan hukuman sebagai pencegahan ialah bahwa dengan adanya hukuman akan menahan pelaku kesalahan agar tidak mengulangi perbuatannya atau agar ia tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Termasuk dalam tujuan pencegahan ini adalah agar orang lain tercegah melakukan perbuatan salah seperti yang dilakukan pelaku karena mengetahui/menyaksikan akibat atau hukuman dari perbuatan salah pelaku yang telah diberi hukuman.⁵⁸ Ringkasnya, dengan adanya sanksi hukum ('*uqubah*) maka akan mencegah pelaku mengulangi perbuatan kesalahan dan akan mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama karena mengetahui atau melihat sanksi hukum atas perbuatan salah tersebut.

Kedua, pengertian tujuan hukuman sebagai pendidikan ialah bahwa suatu hukuman ditetapkan dalam rangka memberi pengajaran serta mengusahakan kebaikan terhadap diri manusia.⁵⁹ Keberadaan sanksi motivasinya adalah pendidikan terhadap manusia sehingga mereka menjauhi perbuatan kesalahan. Tujuan hukuman sebagai pendidikan memandang bahwa dengan adanya sanksi akan dapat menjadikan manusia tidak sekedar takut akan materi sanksinya, melainkan manusia menjadi terdidik sehingga membangun kesadaran mereka untuk membenci perbuatan yang dikategorikan salah, atau merasa benci terhadap perilaku menyimpang dari syariat serta dengan harapan mendapat rida Allah dengan menghindari kesalahan tersebut. Membangunkan kesadaran seperti ini sangat penting dalam tujuan adanya hukuman. Terlebih lagi dalam konsep religiusitas, individu yang menyadari adanya sanksi hukum ('*uqubah*) dari Allah lazimnya ada proses berpikir tatkala dirinya melakukan perbuatan salah. Ia akan menyadari perbuatan salah itu dibenci Tuhan. Pada akhirnya manusia menjadi terdidik karena adanya sanksi sehingga akan

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, h. 137.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 138.

menghindari perbuatan dosa dan kesalahan karena kesadaran mereka.

Sebagian besar teori hukum, di luar hukum Islam, juga memandang kedudukan sanksi sebagai sesuatu yang niscaya, atau tidak boleh tidak ada sanksi. Mereka mengamati bahwa secara eksplisit maupun implisit, norma yang membedakan norma hukum⁶⁰ dan norma-norma lainnya adalah eksistensi paksaan atau sanksi.⁶¹ Bahkan menurut kaum positivis, unsur paksaan dikaitkan dengan pengertian tentang hierarki perintah secara formal, yakni unsur paksaan harus tertulis juga.

Perdebatan para pakar hukum barat dalam permasalahan dasar diadakannya hukuman terlihat dari tiga teori berikut:⁶²

- a) Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*). Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Alasannya adalah karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai imbalannya (*vergeliding*), maka pelaku harus diberi penderitaan juga.
- b) Teori maksud atau tujuan (*relative/doeltheorie*). Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Tujuan hukuman adalah mencegah kejahatan. Ada perbedaan pendapat dalam hal pencegahan, yaitu pencegahan umum (*algemene preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*). Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat umum, dan

⁶⁰ Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, h. 73.

⁶² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 192-193.

pencegahan khusus ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan.

- c) Teori gabungan (*vereninginstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Para ahli hukum pidana Islam juga telah merumuskan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- a) Pembalasan (*Al-Jaza'*). Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Pembalasan ini dianggap sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Istilah pembalasan banyak digunakan dalam tindak pidana *hudud*. Tujuan pembalasan terlihat pada praktiknya memang konsisten melaksanakan ketentuan hukuman. Dalam kasus Fatimah al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasul menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.⁶³

⁶³ Diceritakan, pada masa Nabi Muhammad Saw, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku *al-Makhzumiyah* yang bernama Fatimah ketahuan mencuri bokor emas (pinggan besar yang cekung dan bertepi lebar). Pencurian ini membuat jajaran Suku *al-Makhzumiyah* gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindarkan, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakimnya. Bayang-bayang Fatimah *al-Makhzumiyah* akan menerima hukum potong tangan terus menghantui mereka. Dan, jika hukum potong tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib dahsyat, karena dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik apapun. Upaya lobi-lobi politis pun digalakkan dengan tujuan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang berdinar-dinar emas pun 'dihamburkan' untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai 'pelobi' oleh Suku al-Makzumiyah. Kenapa Usamah bin Zaid? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi Muhammad Saw. Melalui orang kesayangan Nabi

Teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekuler, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam. Namun yang pasti, dalam syariat Islam, tujuan seperti ini memang jelas dapat dipahami dan memiliki sandaran yang kuat dari Alquran, Sunnah, dan pendapat hukum *fuqaha*.

- b) Pencegahan (*Al-Zajr*). Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana tidak terulang lagi. Tujuan hukuman bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk mencegah mereka agar terhindar dari perbuatan salah. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan harapan agar mereka tercegah dari melakukan kesalahan karena ada sanksinya. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatan kesalahan sebelumnya, sehingga ia menjadi jera dengan sanksi hukum akibat perbuatannya.⁶⁴ Tujuan pencegahan ini mendapatkan perhatian dan pertimbangan besar di kalangan hakim dan/atau *fuqaha* dalam memberikan justifikasi terhadap bentuk-bentuk hukuman yang ditetapkan.

Muhammad Saw ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah al-Makhzumiyah dari jerat hukun bisa tercapai. Namun apa yang terjadi? Upaya lobi Usamah bin Zaid, itu justru mendulang 'dampratan' keras dari Nabi Muhammad Saw, bukannya simpati atau belas kasihan. Ketegasan Nabi Muhammad Saw dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, hatta oleh orang terdekat dan kesayangannya. Untuk itu, Nabi Muhammad Saw lantas berkata lantang: "Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah bint Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya."

⁶⁴ Ocktoberriasyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, dalam Jurnal In Right, Vol.1. No.I, 2011, h. 23.

- c) Pemulihan/Perbaikan (*Al-Ishlah*). Satu lagi tujuan pemidanaan dalam pemikiran hukum Islam ialah untuk memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana.⁶⁵ Malahan pada pandangan sebagian *fuqaha*, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan menurut pemikiran hukum Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan *fuqaha* tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Atas tujuan ini sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman seperti itu (pengasingan atau penjara) akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertobat. Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini ialah pandangan-pandangan mazhab Maliki dan mazhab Zhahiri tentang hukuman atas perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan diasingkan. Dalam menafsirkan ayat tentang pencurian mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut. Sebaliknya dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh hakim sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana dan juga masyarakat. Tujuan pemulihan yang paling jelas adalah dalam hukuman berbentuk *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mendidik dan memulihkan pelaku kesalahan atau tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah

⁶⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 257.

diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukannya (misalnya residivis). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan.

- d) Restorasi (*Al-Isti'adah*). Jika dalam tujuan pemulihan lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana, maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban. Adanya hukuman bertujuan untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.⁶⁶ Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman *diyat*, yaitu hukuman pengganti dari hukuman *qishash* apabila keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan. Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian *diyat* oleh pelaku pembunuhan merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam pihak korban dan mewujudkan kembali ketenangan yang telah terusik karena ulah perbuatan pelaku.
- e) Penebusan dosa (*Al-Takfir*). Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi *ukhrawi* dalam penerapan hukum pidana Islam. Dengan pelaksanaan sanksi atau hukuman syari'at maka ia terlepas dari beban hukuman di akhirat. Ketika manusia melakukan kejahatan, kelak ia akan menerima akibat perbuatannya di akhirat. Dengan demikian, melaksanakan sanksi pidana Islam di dunia, menurut *fuqaha*, bertujuan untuk menggugurkan dosa pidana yang telah dilakukannya.⁶⁷

⁶⁶ Ocktoberinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, Ibid., h. 31.

⁶⁷ Ocktoberinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, Ibid., h. 32.

diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukannya (misalnya residivis). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan.

- d) Restorasi (*Al-Isti'adah*). Jika dalam tujuan pemulihan lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana, maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban. Adanya hukuman bertujuan untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.⁶⁶ Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman *diyat*, yaitu hukuman pengganti dari hukuman *qishash* apabila keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan. Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian *diyat* oleh pelaku pembunuhan merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam pihak korban dan mewujudkan kembali ketenangan yang telah terusik karena ulah perbuatan pelaku.
- e) Penebusan dosa (*Al-Takfir*). Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi *ukhrawi* dalam penerapan hukum pidana Islam. Dengan pelaksanaan sanksi atau hukuman syari'at maka ia terlepas dari beban hukuman di akhirat. Ketika manusia melakukan kejahatan, kelak ia akan menerima akibat perbuatannya di akhirat. Dengan demikian, melaksanakan sanksi pidana Islam di dunia, menurut *fugaha*, bertujuan untuk menggugurkan dosa pidana yang telah dilakukannya.⁶⁷

⁶⁶ Ocktoerrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, Ibid., h. 31.

⁶⁷ Ocktoerrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, Ibid., h. 32.

Ringkasnya tujuan *'uqubah* atau sanksi hukum atau pemidanaan adalah untuk menjaga tujuan-tujuan utama syariah yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*. Ada lima tujuan hukum Islam, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasb* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqashid al-syari'ah*.

2. Filosofi Sanksi Hukum Pelanggar Wajib Zakat

Apa hakikat sanksi hukum pelanggar wajib zakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan tentang zakat yang merupakan kewajiban dari Pembuat hukum (*Syari'*) terhadap muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Zakat adalah satu-satunya diantara rukun Islam yang berdimensi *haqqullah* dan *haqq al-'Ibad*. Berbeda dengan rukun Islam lain yang hanya berdimensi *haqqullah*. Maksudnya adalah pengingkaran zakat tidak hanya mengabaikan kewajiban kepada Allah, tetapi juga mengabaikan kewajibannya kepada manusia. Rukun-rukun Islam selain zakat tidak bersentuhan langsung dengan manusia lain, seperti syahadat, shalat, puasa, dan haji, yang kesemuanya apabila tidak dikerjakan tidak akan menghilangkan hak orang lain. Berbeda dengan zakat yang apabila seseorang tidak mengerjakannya maka akan menghilangkan hak orang lain yang seharusnya didapatkan jika zakat dikerjakan.

Sanksi hukum zakat merupakan *ijtihad* umat Islam, karena tidak ada petunjuk *sharih* (jelas) tentang bentuk hukumannya dari sumber hukum Islam. Oleh karena itu, pengembangan *ijtihad* mendapat jaminan keberlangsungannya demi merumuskan hukum yang digali dari Alquran dan Hadis.

Sanksi hukum dalam bentuk *ta'zir* tidak terlepas dari pemahaman terhadap tujuan pemidanaan dalam hukum Islam. Allah Swt menetapkan hukum-hukum *'uqubat* (hukum pidana, sanksi, dan pelanggaran) menurut fungsinya dipahami *fuqaha* sebagai *zawajir* dan *jawabir*. Fungsi *zawajir* adalah pemidanaan itu untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak

mengulangi lagi kejahatan dan hukuman, serta menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan jarimah seperti itu. Sedangkan fungsinya sebagai *jawabir* ialah hukuman itu berfungsi menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat, dengan kata lain menghapuskan dosa *jarimah*.⁶⁸

Manusia diciptakan oleh Allah. Pada diri manusia diciptakan pula naluri⁶⁹ dan berbagai kebutuhan jasmani. Naluri dan kebutuhan jasmani tersebut adalah suatu potensi semangat hidup dalam diri manusia. Naluri berfungsi sebagai penggerak usaha manusia untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi, manusia melakukan semua tindakannya adalah untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Membiarkan pemuasan terhadap kebutuhan tanpa membatasinya dengan aturan akan menyebabkan kekacauan, kerusakan, dan menjurus ke arah pemuasan yang salah dan menyimpang.

Allah Swt telah mengatur tata cara pemuasan naluri-naluri dan kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia, dan mengatur perbuatan manusia tersebut melalui hukum-hukum *syara'*. Syari'at Islam mengatur perbuatan manusia dalam garis-garis besar yang telah ditentukan yaitu Alquran dan Sunnah. Garis-garis besar tersebut dijadikan sebagai sumber hukum untuk setiap kejadian yang terus muncul dalam kehidupan manusia, sehingga dari garis-garis besar tersebut dapat digali hukum perbuatan manusia yang sesuai dengan syari'at.

Fuqaha memahami bahwa syari'at Islam menetapkan ketentuan hukum halal dan haram dalam rangka menjaga perilaku manusia. Oleh karena itu, syari'at datang dalam bentuk perintah dan larangan. Titah yang berupa kewajiban

⁶⁸ Juhaya S. Praja dan Syahrul Anwar, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: t.p., 2013), h. 147.

⁶⁹ Naluri atau insting adalah suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun (filogenetik). Dalam psikoanalisis, naluri dianggap sebagai tenaga psikis bawah sadar yang dibagi atas naluri kehidupan (*eros*) dan naluri kematian (*thanos*).

adalah tuntutan kepada manusia untuk melaksanakan titah tersebut, begitu juga titah yang berupa larangan adalah tuntutan kepada manusia untuk menjauhi larangan tersebut. Jika manusia melanggar perintah dan larangan syari'at maka ia melakukan perbuatan tercela atau melakukan tindak kriminal, pelanggaran tersebut berupa pengabaian perintah atau melanggar hal-hal yang terlarang. Pelanggaran perintah dan larangan seseorang akan dianggap sebagai tindak kriminal sehingga harus dijatuhi hukuman karena perbuatannya. Ketiadaan hukuman pelanggaran perintah dan larangan maka peraturan tidak memiliki arti. Perintah apapun tidak memiliki nilai jika tak ada balasan hukuman bagi pelanggarnya.

Hukuman melanggar peraturan Allah meliputi hukuman dunia dan akhirat. Adapun hukuman di dunia, Allah telah menjelaskannya dalam Alquran dan Hadits, baik secara global maupun terperinci. Dan Allah telah memberikan wewenang pelaksanaan hukuman tersebut kepada negara. Jadi, hukuman dalam Islam yang telah dijelaskan pelaksanaannya terhadap para penjahat di dunia ini, dilaksanakan oleh Imam (*khalifah*) atau wakilnya (*hakim*), yaitu dengan menerapkan sanksi-sanksi yang dilakukan oleh negara, baik yang berupa *had*, *ta'zir* dan atau *kafarat*. Hukuman yang dijatuhkan di dunia akan menggugurkan siksaan di akhirat terhadap si pelaku kejahatan. Hukuman *'uqubat* tersebut bersifat sebagai pencegah dan penebus, yaitu akan mencegah manusia dari perbuatan dosa atau melakukan tindakan kriminal, sekaligus berfungsi sebagai penebus siksaan di akhirat nanti, sehingga gugurlah siksaan itu bagi seorang muslim yang melakukannya.

Dalam rangka mencapai tujuan itulah banyak kaum muslimin yang datang kepada Rasulullah saw untuk mengakui kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan agar beliau menjatuhkan hukuman atas mereka di dunia sehingga mereka terbebas dari azab Allah di hari kiamat nanti. Mereka lebih berani menahan sakitnya hukuman *had* dan *qishash* di dunia, sebab hal itu jauh lebih ringan dibandingkan azab di akhirat nanti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan:

1. Zakat adalah kewajiban yang jelas ditemui perintahnya dalam Alquran dan Hadis. Disamping perintah mengerjakan zakat, ada ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Sanksi-sanksi dalam Alquran dan Hadis diantaranya adalah dimasukkan dalam golongan yang berhak diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya Ibnu Umar), harta benda mereka akan hancur rusak (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi), dan apabila keengganan menunaikan zakat memassal maka Allah Swt akan menurunkan azabNya dalam bentuk kemarau yang panjang (HR. Imam Thabrani). Sanksi tersebut adalah ancaman penderitaan semasa hidup di dunia. Sedangkan di akhirat nanti, harta benda yang tidak dikeluarkan akan menjadi azab bagi pemiliknya (QS. Al-Taubah, 9: 34-35 dan QS. Ali Imran, 3: 180).
2. *Fugaha* sepakat bahwa muslim yang tidak membayar zakat harus diambil hartanya senilai wajib zakat yang harus dikeluarkannya, serta dibolehkan dengan tambahan hukuman lain berdasarkan kebijakan hakim. Imam Syafi'i berpendapat dalam *qaul qadim* bahwa orang yang tidak menunaikan kewajiban zakat harus diambil sebagian hartanya di samping harta yang wajib dikeluarkan. Hanafi berpendapat bahwa orang itu harus dipenjara hingga ia mengeluarkan zakat tetapi tidak diambil hartanya secara paksa.
3. *Istishlah* yang dalam beberapa sebutan dikenal juga sebagai *mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya. Dengan demikian, bentuk hukuman pelanggar wajib zakat menjadi sangat fleksibel karena tidak ada

ketentuannya secara tekstual dalam *nash*. Para mujtahid mendapat porsi yang besar untuk memikirkan bentuk hukuman yang tepat/sesuai dengan tempat dan waktu. Mengkaji zakat dengan perspektif maslahat akan selaras dengan falsafah bangsa. Butir ke-11 dari Sila Kelima Pancasila adalah: "*Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.*" Selanjutnya Pasal 34 UUD menyatakan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat kaum lemah. Pasal 34 UUD di atas terkait pula dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 4. Dalam pasal 27 ayat 2 dinyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Sementara itu pasal 33 ayat 4 dinyatakan "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*"

B. Saran

Beberapa saran terkait penelitian ini adalah:

1. Kajian *hikmat al-tasyri'* harus terus digiatkan sehingga kontribusi hukum Islam dalam pembangunan bangsa Indonesia tetap eksis dan nyata.
2. Sanksi hukum atas muzaki yang tidak menunaikan zakatnya harus dimasukkan dalam ketentuan undang-undang yang akan datang, dengan kata lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perlu direvisi.
3. Menggiatkan pengkajian akademik untuk menemukan metode yang relevan dalam mengembangkan kualitas ketaatan umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Miftah, "Zakat sebagai Hukum Qada'i dalam Negara Indonesia", *Disertasi Doktor*. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terj. Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrachman Qadir, "Zakat dalam Dimensi Ibadah Mahdhah dan Sosial", *Disertasi Doktor*. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 1998.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabat al-Riyadh al-Haditsah, t.th.
- Ahmad Fathi Bahnasi, *Al'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-2. Kairo: Dar al-Zaid al-Arubah, 1961.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.
- Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, jilid 1. Kairo: Dar al-Shabuni, t.th.
- Ali Yafie, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah: Kosep-konsep Istihsan, Istishlah, Dan Mashlahat Al-Ammah*, Editor: Budhy Munawar-Rachman. Jakarta: Yayasan paramadina, 1994.
- Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, cet. ke-1. Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2005.

- Didin Hafidhuddin, "Zakat dalam Perekonomian Modern", *Disertasi Doktor*. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2001.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islamy*. Mesir: Maktabat al-Nahdah al-Mishriyyah, 1979.
- Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn al-Manzhur, *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1956.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsr*. t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Katsir, *Tartib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wa al-Nihayah*, editor: Muhammad ibn Shamil, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Isa Abduh, *Al-Nazhm al-Maliyah fi al-Islam*. Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1397 H.
- Ismail Haqqi al-Buruswi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, terj. Prof. Dr. H.M.D. Dahlan, juz iv, cet. i. Bandung: CV. Diponegoro, 1996.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Juhaya S. Praja dan Syahrul Anwar, *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: t.p., 2013.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, cet. ke-17. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mathew B. Mills dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah wa al-'Uqubat fi al-Fiqh al-Islami*. t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

- Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Kairo: Muhammad Ali Shabih, 1953.
- Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, jilid 3, cet. ke-3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Ocktoberriasyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, dalam Jurnal In Right, Vol.1. No.1, 2011, h. 23.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-3. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah ma'a Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rasyidah*, cet. ke-1. Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1991.
- Sjechul Hadi Permono, "Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional", *Disertasi Doktor*. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, terj. *Al-Thathbiq Al-Mu'ashir Li al-Zakah*. Bandung: Pustaka Setia, t.th.
- Syahrul Anwar, "Hakikat Manusia dan Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Nasional".
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 3, cet. ke-4. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yusuf Qaradhwai, *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, cet. ke-21. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.